



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 43 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2023**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan kegiatan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Inspektorat adalah unsur pengawas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan intern, perlu menyusun program kerja yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan intern

yang dilakukan oleh Inspektorat selama setahun yang disebut Program Kerja Pengawasan Tahunan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 898);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Keputusan Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan panduan bagi Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas:

- a. Peta Risiko (*Risk Register*) Unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Faktor Risiko Unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Daftar Profil Risiko berdasarkan hasil perhitungan Risiko Komposit dari Peta Risiko (*Risk Register*) dan Faktor Risiko Unit Organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023.



- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2023  
KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PROGRAM KERJA  
PENGAWASAN TAHUNAN  
BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN 2023

NOMOR : 43 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2023

**PETA RISIKO (*RISK REGISTER*) UNIT ORGANISASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Area Pengawasan	Peta Risiko (PR)			
		Komposit Risiko	Bobot	Nilai PR	
1	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Risiko Tinggi	9	50%	4,5
2	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Risiko Tinggi	9	50%	4,5
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	Risiko Tinggi	9	50%	4,5
4	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Risiko Tinggi	9	50%	4,5
5	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional	Risiko Tinggi	9	50%	4,5
6	Direktorat Sertifikasi Profesi	Risiko Tinggi	9	50%	4,5
7	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Risiko Tinggi	6	50%	3,0
8	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	Risiko Tinggi	6	50%	3,0
9	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Risiko Sedang	6	50%	3,0

No	Area Pengawasan	Peta Risiko (PR)			
		Komposit Risiko		Bobot	Nilai PR
10	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	Risiko Sedang	6	50%	3,0
11	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Risiko Sedang	6	50%	3,0
12	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Risiko Sedang	6	50%	3,0
13	Pusdiklat Pengadaan Barang/Jasa	Risiko Sedang	6	50%	3,0
14	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Risiko Sedang	4	50%	2,0
15	Inspektorat	Risiko Sedang	4	50%	2,0
16	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	Risiko Rendah	1	50%	0,5

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PROGRAM KERJA  
PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS  
RISIKO INSPEKTORAT LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN 2023

NOMOR : 43 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2023

**PENILAIAN 8 FAKTOR RISIKO UNIT ORGANISASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Unit Organisasi	(1) Pagu Anggaran		(2) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa		(3) Jumlah Sumber Daya Manusia		(4) Rekomendasi Tindak Lanjut atas Hasil Audit BPK		(5) Nilai Evaluasi SAKIP		(6) Jumlah Aplikasi / ATB		(7) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		(8) Jumlah Penerimaan Gratifikasi	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor
1	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Risiko Sangat Tinggi	5	Risiko Sangat Tinggi	5	Risiko Sangat Tinggi	5	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Sedang	3	Risiko Sangat Tinggi	5	Rendah	2	Risiko Sedang	3



No	Unit Organisasi	(1) Pagu Anggaran		(2) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa		(3) Jumlah Sumber Daya Manusia		(4) Rekomendasi Tindak Lanjut atas Hasil Audit BPK		(5) Nilai Evaluasi SAKIP		(6) Jumlah Aplikasi / ATB		(7) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		(8) Jumlah Penerimaan Gratifikasi	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor
2	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Risiko Sangat Tinggi	5	Risiko Sangat Tinggi	5	Risiko Sangat Tinggi	5	Risiko Sedang	3	Risiko Sedang	3	Risiko Sangat Tinggi	5	Rendah	2	Risiko Sangat Rendah	1
3	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	Risiko Sangat Tinggi	5	Risiko Sangat Tinggi	5	Risiko Tinggi	4	Risiko Sangat Tinggi	5	Risiko Sedang	3	Risiko Sangat Rendah	1	Rendah	2	Risiko Sangat Rendah	1
4	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Risiko Sedang	3	Risiko Tinggi	4	Risiko Tinggi	4	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Sedang	3	Risiko Sangat Tinggi	5	Rendah	2	Risiko Sedang	3
5	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Risiko Sedang	3	Risiko Sedang	3	Risiko Sangat Tinggi	5	Risiko Rendah	2	Risiko Sedang	3	Risiko Rendah	2	Sangat Rendah	1	Risiko Rendah	2
6	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Risiko Rendah	2	Risiko Sangat Tinggi	5	Risiko Sedang	3	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Sedang	3	Risiko Rendah	2	Rendah	2	Risiko Sangat Rendah	1
7	Pusdiklat Pengadaan Barang/Jasa	Risiko Sedang	3	Risiko Sedang	3	Risiko Tinggi	4	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Sedang	3	Risiko Rendah	2	Sangat Rendah	1	Risiko Rendah	2
8	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Risiko Sedang	3	Risiko Rendah	2	Risiko Sedang	3	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Sedang	3	Risiko Rendah	2	Rendah	2	Risiko Sangat Rendah	1
9	Direktorat Sertifikasi Profesi	Risiko Sedang	3	Risiko Rendah	2	Risiko Tinggi	4	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Sedang	3	Risiko Rendah	2	Rendah	2	Risiko Sangat Rendah	1
10	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional	Risiko Rendah	2	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Rendah	2	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Sedang	3	Risiko Sangat Rendah	1	Rendah	2	Risiko Tinggi	4
11	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	Risiko Rendah	2	Risiko Sedang	3	Risiko Sedang	3	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Sedang	3	Risiko Sangat Rendah	1	Rendah	2	Risiko Sangat Rendah	1
12	Biro Perencanaan dan Keuangan	Risiko Rendah	2	Risiko Rendah	2	Risiko Sangat Tinggi	5	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Sedang	3	Risiko Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Risiko Sangat Rendah	1
13	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Risiko Sedang	3	Risiko Rendah	2	Risiko Rendah	2	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Sedang	3	Risiko Sangat Rendah	1	Rendah	2	Risiko Sangat Rendah	1

No	Unit Organisasi	(1) Pagu Anggaran		(2) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa		(3) Jumlah Sumber Daya Manusia		(4) Rekomendasi Tindak Lanjut atas Hasil Audit BPK		(5) Nilai Evaluasi SAKIP		(6) Jumlah Aplikasi / ATB		(7) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		(8) Jumlah Penerimaan Gratifikasi	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor
14	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	Risiko Rendah	2	Risiko Rendah	2	Risiko Sedang	3	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Sedang	3	Risiko Sangat Rendah	1	Rendah	2	Risiko Sangat Rendah	1
15	Inspektorat	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Rendah	2	Risiko Rendah	2	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Sedang	3	Risiko Rendah	2	Sangat Rendah	1	Risiko Sangat Rendah	1
16	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Risiko Rendah	2	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Rendah	2	Risiko Sangat Rendah	1	Risiko Sedang	3	Risiko Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Risiko Sangat Rendah	1

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PROGRAM KERJA  
PENGAWASAN TAHUNAN  
BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN 2023

NOMOR : 43 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2023

**DAFTAR PROFIL RISIKO AUDITI/KLIEN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN 2023**

No	Area Pengawasan	Peta Risiko (PR)			Faktor Risiko (FR)			Nilai Total Profil Risiko	Peringkat
		Komposit Risiko	Bobot	Nilai PR	Jumlah 9 Faktor Risiko	Bobot	Nilai FR		
1	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	9	50%	4,5	29	50%	14,5	19	1

No	Area Pengawasan	Peta Risiko (PR)			Faktor Risiko (FR)			Nilai Total Profil Risiko	Peringkat
		Komposit Risiko	Bobot	Nilai PR	Jumlah 9 Faktor Risiko	Bobot	Nilai FR		
2	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	6	50%	3	29	50%	14,5	17,5	2
3	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	9	50%	4,5	25	50%	12,5	17	3
4	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	6	50%	3	26	50%	13	16	4
5	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	6	50%	3	21	50%	10,5	13,5	5
6	Direktorat Sertifikasi Profesi	9	50%	4,5	17	50%	8,5	13	6
7	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	9	50%	4,5	17	50%	8,5	13	7
8	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	6	50%	3	19	50%	9,5	12,5	8
9	Biro Perencanaan dan Keuangan	9	50%	4,5	16	50%	8	12,5	9
10	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional	9	50%	4,5	16	50%	8	12,5	10
11	Pusdiklat Pengadaan Barang/Jasa	6	50%	3	18	50%	9	12	11
12	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	6	50%	3	15	50%	7,5	10,5	12
13	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	6	50%	3	15	50%	7,5	10,5	13
14	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	1	50%	0,5	16	50%	8	8,5	14

No	Area Pengawasan	Peta Risiko (PR)			Faktor Risiko (FR)			Nilai Total Profil Risiko	Peringkat
		Komposit Risiko	Bobot	Nilai PR	Jumlah 9 Faktor Risiko	Bobot	Nilai FR		
15	Inspektorat	4	50%	2	13	50%	6,5	8,5	15
16	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	4	50%	2	12	50%	6	8	16

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PROGRAM KERJA  
PENGAWASAN TAHUNAN  
BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN 2023

NOMOR : 43 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2023

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LKPP TAHUN 2023**

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
<b>A. KEGIATAN PENGAWASAN INTERN</b>							
<b>1</b>	<b>Audit</b>						
<b>1.1</b>	<b>Audit Kinerja</b>						
1.1.1	Audit Kinerja atas Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan LKPP	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	8	15	1	April	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
1.1.2	Audit Kinerja atas Tata Kelola Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung LKPP	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	8	15	1	Agustus	Laporan
<b>1.2</b>	<b>Audit dengan Tujuan Tertentu</b>						
1.2.1	Audit Ketaatan atas Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran LKPP	Biro Perencanaan dan Keuangan	8	15	1	Februari	Laporan
1.2.2	Audit Ketaatan atas Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	8	15	1	September	Laporan
1.2.3	Audit Ketaatan atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan LKPP	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	7	15	1	Juni	Laporan
1.2.4	Audit atas Teknologi Informasi di Lingkungan LKPP	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	8	15	1	Juli	Laporan
1.2.5	Audit dengan Tujuan Tertentu atas Penyelesaian Kerugian Negara	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	5	15	1	Januari	Laporan
1.2.6	Audit dengan Tujuan Tertentu atas Proses Pemilihan Penyedia	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	6	20	1	Januari	Laporan
<b>JUMLAH KEGIATAN AUDIT</b>				<b>125</b>	<b>8</b>		
<b>2</b>	<b>Reviu</b>						
2.1	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Indikatif LKPP TA 2024	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	7	10	1	Mei	Laporan
2.2	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Alokasi LKPP TA 2024	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	7	10	1	Oktober	Laporan
2.3	Reviu atas DIPA Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	8	10	1	Februari	Laporan
2.4	Reviu atas DIPA Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	8	10	1	Agustus	Laporan
2.5	Reviu atas DIPA Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	8	10	1	September	Laporan
2.6	Reviu atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2025	Sekretariat Utama c.q. Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	7	10	1	September	Laporan
2.7	Reviu atas Laporan Kinerja Unit Organisasi Tahun 2022	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri	8	10	1	Januari	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
2.8	Reviu atas Laporan Kinerja LKPP Tahun 2022	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	7	10	1	Februari	Laporan
2.9	Reviu atas PAPBJ Triwulan IV Tahun Anggaran 2022	LKPP c.q. Kuasa Pengguna Anggaran/Sekretariat Utama	7	10	1	Januari	Laporan
2.10	Reviu atas PAPBJ Triwulan I Tahun Anggaran 2023	LKPP c.q. Kuasa Pengguna Anggaran/Sekretariat Utama	7	10	1	Maret	Laporan
2.11	Reviu atas PAPBJ Triwulan II Tahun Anggaran 2023	LKPP c.q. Kuasa Pengguna Anggaran/Sekretariat Utama	7	10	1	Juni	Laporan
2.12	Reviu atas PAPBJ Triwulan III Tahun Anggaran 2023	LKPP c.q. Kuasa Pengguna Anggaran/Sekretariat Utama	7	10	1	September	Laporan
2.13	Reviu atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ( <i>Unaudited</i> )	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	9	10	1	Januari	Laporan
2.14	Reviu atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ( <i>Audited</i> )	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	7	5	1	April	Laporan
2.15	Reviu atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	7	10	1	Juli	Laporan
2.16	Reviu atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	7	10	1	Oktober	Laporan
2.17	Reviu atas Laporan BMN Tahun Anggaran 2022 ( <i>Unaudited</i> )	Sekretariat Utama c.q. Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	7	10	1	Januari	Laporan
2.18	Reviu atas Laporan BMN Tahun Anggaran 2022 ( <i>Audited</i> )	Sekretariat Utama c.q. Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	7	10	1	April	Laporan
2.19	Reviu atas Laporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Utama c.q. Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	7	10	1	Juli	Laporan
2.20	Reviu Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2022	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	7	10	1	Januari	Laporan
2.21	Reviu atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Sistem Purchasing Semester II Tahun Anggaran 2022	LKPP c.q. Kuasa Pengguna Anggaran/Sekretariat Utama	7	10	1	Februari	Laporan
2.22	Reviu atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Sistem Purchasing Semester I Tahun Anggaran 2023	LKPP c.q. Kuasa Pengguna Anggaran/Sekretariat Utama	7	10	1	Agustus	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
2.23	Reviu atas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2022	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	8	10	1	Februari	Laporan
<b>JUMLAH KEGIATAN REVIU</b>				<b>225</b>	<b>23</b>		
<b>3</b>	<b>Evaluasi</b>						
3.1	Evaluasi PMPRB	LKPP	8	7	1	Mei	Laporan
3.2	Evaluasi atas Implementasi SAKIP	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri	8	7	1	Mei	Laporan
3.3	Evaluasi atas Penerimaan Hibah LKPP	LKPP	7	7	1	Maret	Laporan
3.4	Evaluasi atas Standar Operasional Prosedur pada Kegiatan Pelayanan Publik	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	7	7	1	Maret	Laporan
<b>JUMLAH KEGIATAN EVALUASI</b>				<b>28</b>	<b>4</b>		
<b>4</b>	<b>Pemantauan</b>						
4.1	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan IV Tahun Anggaran 2022	LKPP	5	5	1	Januari	Laporan
4.2	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan I Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	April	Laporan
4.3	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan II Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Juli	Laporan
4.4	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan III Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Oktober	Laporan
4.5	Pemantauan atas Penanganan <i>Whistle Blowing Systems</i> Internal Triwulan IV Tahun Anggaran 2022	LKPP	5	5	1	Januari	Laporan
4.6	Pemantauan atas Penanganan <i>Whistle Blowing Systems</i> Internal Triwulan I Tahun Anggaran 2023	LKPP	4	5	1	April	Laporan
4.7	Pemantauan atas Penanganan <i>Whistle Blowing Systems</i> Internal Triwulan II Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Juli	Laporan
4.8	Pemantauan atas Penanganan <i>Whistle Blowing Systems</i> Internal Triwulan III Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Oktober	Laporan
4.9	Pemantauan atas Penanganan Gratifikasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2022	LKPP	4	5	1	Januari	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
4.10	Pemantauan atas Penanganan Gratifikasi Triwulan I Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	April	Laporan
4.11	Pemantauan atas Penanganan Gratifikasi Triwulan II Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Juli	Laporan
4.12	Pemantauan atas Penanganan Gratifikasi Triwulan III Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Oktober	Laporan
4.13	Pemantauan atas Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022	LKPP	4	5	1	Januari	Laporan
4.14	Pemantauan atas Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I Tahun Anggaran 2023	LKPP	4	5	1	April	Laporan
4.15	Pemantauan atas Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan II Tahun Anggaran 2023	LKPP	4	5	1	Juli	Laporan
4.16	Pemantauan atas Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan III Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Oktober	Laporan
4.17	Pemantauan atas Pungutan Liar di Lingkungan LKPP Semester II Tahun Anggaran 2022	LKPP	5	5	1	Januari	Laporan
4.18	Pemantauan atas Pungutan Liar di Lingkungan LKPP Semester I Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Juli	Laporan
4.19	Pemantauan atas LHKPN dan LHKASN LKPP Tahun 2022	LKPP	5	5	1	Maret	Laporan
4.20	Pemantauan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Triwulan I Tahun 2023	Inspektorat	7	3	1	Maret	Laporan
4.21	Pemantauan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Triwulan II Tahun 2023	Inspektorat	8	3	1	Juni	Laporan
4.22	Pemantauan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Triwulan III Tahun 2023	Inspektorat	8	3	1	September	Laporan
4.23	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B3 Tahun 2023	Inspektorat	5	3	1	April	Laporan
4.24	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B6 Tahun 2023	Inspektorat	5	3	1	Juli	Laporan
4.25	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B9 Tahun 2023	Inspektorat	4	3	1	Oktober	Laporan



No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
4.26	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B12 Tahun 2023	Inspektorat	5	3	1	Desember	Laporan
4.27	Pemantauan/Monitoring atas Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) LKPP Semester II Tahun Anggaran 2022	LKPP	6	10	1	Februari	Laporan
4.28	Pemantauan/Monitoring atas Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) LKPP Semester I Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	10	1	Agustus	Laporan
<b>JUMLAH KEGIATAN PEMANTAUAN</b>				<b>136</b>	<b>28</b>		
<b>5</b>	<b>Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern</b>						
5.1	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Semester I Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Juli	Laporan
5.2	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Semester II Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Desember	Laporan
5.3	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Agustus	Laporan
5.4	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Desember	Laporan
<b>JUMLAH KEGIATAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN</b>				<b>20</b>	<b>4</b>		
<b>JUMLAH A</b>				<b>534</b>	<b>67</b>		
<b>B. KONSULTANSI</b>							
<b>6</b>	<b>Advisori</b>						
6.1	Coaching Clinic	<i>tbd</i>	3	1	1	Januari - Desember	Laporan
6.2	Coaching Clinic	<i>tbd</i>	3	1	1	Januari - Desember	Laporan
6.3	Konsultansi (Advisori Mendalam)	<i>tbd</i>	7	10	1	Januari - Desember	Laporan
6.4	Konsultansi (Advisori Mendalam)	<i>tbd</i>	7	10	1	Januari - Desember	Laporan
<b>JUMLAH KEGIATAN ADVISORI</b>				<b>22</b>	<b>4</b>		

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
<b>7</b>	<b>Fasilitasi</b>						
7.1	Pendampingan atas Pelaksanaan Zona Integritas	LKPP	6	7	1	Mei	Laporan
7.2	Pendampingan dalam rangka Persiapan Evaluasi Zona Integritas Kementerian PANRB	LKPP	6	7	1	September	Laporan
7.3	Pendampingan atas Implementasi SAKIP Unit Organisasi di LKPP Triwulan I Tahun 2023	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri	5	5	1	Januari	Laporan
7.4	Pendampingan atas Implementasi SAKIP Unit Organisasi di LKPP Triwulan II Tahun 2023	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri	5	5	1	April	Laporan
7.5	Pendampingan atas Implementasi SAKIP Unit Organisasi di LKPP Triwulan III Tahun 2023	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri	5	5	1	Juli	Laporan
7.6	Pendampingan atas Kegiatan Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan LKPP Tahun Anggaran 2022	LKPP	8	60	1	Januari	Laporan
7.7	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di LKPP	LKPP	8	10	1	Juni	Laporan
7.8	Pendampingan atas Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	8	5	1	Januari	Laporan
7.9	Pendampingan atas Proses perundingan <i>Chapter Government Procurement</i> pada berbagai Forum <i>Economic Agreement</i>	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	7	5	1	<i>tbd</i>	Laporan
7.10	Pendampingan atas Penyusunan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP c.q. Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	6	5	1	<i>tbd</i>	Laporan
7.11	Pendampingan atas Penyusunan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP tentang Penilaian Implementasi Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP c.q. Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	6	5	1	<i>tbd</i>	Laporan
7.12	Pendampingan atas Implementasi Manajemen Risiko di Kedeputian I	Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan	6	5	1	Juli	Laporan
7.13	Pendampingan atas Implementasi Manajemen Risiko di Kedeputian II	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	6	5	1	Agustus	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
7.14	Pendampingan atas Implementasi Manajemen Risiko di Kedeputian III	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP	6	5	1	Juli	Laporan
7.15	Pendampingan atas Implementasi Manajemen Risiko di Kedeputian IV	Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah	6	5	1	September	Laporan
7.16	Pendampingan atas Implementasi Manajemen Risiko di Sekretariat Utama	Sekretariat Utama	6	5	1	Agustus	Laporan
7.17	Pendampingan atas Implementasi Manajemen Risiko di Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ	Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ	6	5	1	September	Laporan
<b>JUMLAH KEGIATAN FASILITASI</b>				<b>149</b>	<b>17</b>		
<b>8</b>	<b>Pelatihan &amp; Sosialisasi</b>						
8.1	Sosialisasi Kegiatan Pengawasan	LKPP	3	2	1	Januari - Desember	Dokumen
8.2	Sosialisasi Kegiatan Pengawasan	LKPP	3	2	1	Januari - Desember	Dokumen
8.3	Sosialisasi Kegiatan Pengawasan	LKPP	3	2	1	Januari - Desember	Dokumen
8.4	Sosialisasi Kegiatan Pengawasan	LKPP	3	2	1	Januari - Desember	Dokumen
8.5	Sosialisasi Kegiatan Pengawasan	LKPP	3	2	1	Januari - Desember	Dokumen
8.6	Sosialisasi Kegiatan Pengawasan	LKPP	3	2	1	Januari - Desember	Dokumen
8.7	<i>Workshop</i> Manajemen Risiko	LKPP	5	2	1	Januari - Desember	Dokumen
8.8	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Januari	Inspektorat	2	1	1	Januari	Dokumen
8.9	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Februari	Inspektorat	2	1	1	Februari	Dokumen
8.10	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Maret	Inspektorat	2	1	1	Maret	Dokumen
8.11	Program Pelatihan Mandiri (PPM) April	Inspektorat	2	1	1	April	Dokumen
8.12	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Mei	Inspektorat	2	1	1	Mei	Dokumen

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
8.13	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Juni	Inspektorat	1	1	1	Juni	Dokumen
8.14	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Juli	Inspektorat	1	1	1	Juli	Dokumen
8.15	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Agustus	Inspektorat	2	1	1	Agustus	Dokumen
8.16	Program Pelatihan Mandiri (PPM) September	Inspektorat	2	1	1	September	Dokumen
8.17	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Oktober	Inspektorat	2	1	1	Oktober	Dokumen
8.18	Program Pelatihan Mandiri (PPM) November	Inspektorat	2	1	1	November	Dokumen
8.19	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Desember	Inspektorat	2	1	1	Desember	Dokumen
<b>JUMLAH KEGIATAN PELATIHAN &amp; SOSIALISASI</b>				<b>26</b>	<b>19</b>		
<b>JUMLAH B</b>				<b>197</b>	<b>40</b>		
<b>C. NON PENGAWASAN INTERN</b>							
<b>9</b>	<b>Perencanaan Pengawasan Intern</b>						
9.1	Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan						
9.1.1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2024	Inspektorat	6	15	1	November	Laporan
<b>9.2</b>	<b>Penyusunan Pedoman Pengawasan Intern</b>						
9.2.1	Penyusunan Pedoman atas Kegiatan Pengawasan Intern Berbasis Risiko - Manajemen Risiko	Inspektorat	6	15	1	Januari - Desember	Dokumen
9.2.2	Penyusunan Pedoman atas Kegiatan Pengawasan Intern Berbasis Risiko - Tata Kelola Intern Pengawasan	Inspektorat	6	15	1	Januari - Desember	Dokumen
9.2.3	Penyusunan Pedoman atas Kegiatan Pengawasan Intern Berbasis Risiko	Inspektorat	6	15	1	Januari - Desember	Dokumen
9.2.4	Penyusunan Substansi Teknis dalam Peraturan/Pedoman Pengawasan – Audit Ketaatan	Inspektorat	6	15	1	Januari - Desember	Dokumen
9.2.5	Penyusunan Substansi Teknis dalam Peraturan/Pedoman Pengawasan – <i>Probitiy Audit</i>	Inspektorat	6	15	1	Januari - Desember	Dokumen

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
<b>10</b>	<b>Evaluasi Kebijakan dan Hasil Pengawasan Intern</b>						
10.1	Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Triwulan I Tahun Anggaran 2023	Inspektorat	5	5	1	April	Laporan
10.2	Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Triwulan II Tahun Anggaran 2023	Inspektorat	5	5	1	Juli	Laporan
10.3	Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Triwulan III Tahun Anggaran 2023	Inspektorat	5	5	1	November	Laporan
<b>11</b>	<b>Penyusunan Laporan</b>						
11.1	Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022	Inspektorat	6	10	1	Januari	Laporan



No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
<b>12</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas APIP LKPP</b>						
12.1	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Inspektorat	8	10	1	Juni	Laporan
<b>13</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pejabat/Pegawai Inspektorat Tahun 2023</b>						
13.1	Pendidikan dan Pelatihan Pejabat/Pegawai Inspektorat Tahun 2023	Inspektorat	20	100		Januari - Desember	Dokumen
<b>JUMLAH C</b>				<b>225</b>	<b>11</b>		
<b>JUMLAH A + B + C</b>				<b>956</b>	<b>118</b>		

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI